

# PERILAKU POLITIK KIAI DI PAMEKASAN

Mohammad Muchlis Sholichin

(Penulis, dosen STAIN Pamekasan, Jl. Raya Panglegur Km. 04 Pamekasan.  
Kontak person 081230696089, alamat Jl. Kolpajung Pamekasan)

## **Abstrac**

*Kiais (muslim scholar) and their pesantren (Islamic boarding school) is character of religious leader. They prove themselves as a non-formal leader in Indonesian society. The influence of Kiai depends on both the sophistication knowledge and power they have. It can be recognized from the achievement of their pesantren. In the context of modernity dynamic, another impotant role of kiai is as a patron of Islamic group that tries to articulate their interest, due to the fact that they claim themselves as the acknowledged in organizing a relation with the outside. With their superiority, they can influence and control society. Kiai is also a charismatic and respected leader. They are an ideal figure indicating the high cultural and structural sites in society*

## **Kata-kata kunci**

*kiai, politik, kharisma, dan pesantren*

## **Pendahuluan**

Kiai merupakan sosok pemimpin agama yang dengan pesantrennya telah membuktikan dirinya sebagai pemimpin non formal dalam masyarakat Indonesia. Pengaruh seorang kiai sangat tergantung kepada ketinggian ilmu dan wibawa yang dimilikinya. Ini seringkali ditandai oleh kebesaran dan kemajuan pesantren yang dimilikinya. Munculnya kiai-kiai besar sepanjang akhir abad ke- 19 M dan awal abad ke-20 M, seperti KH. Cholil (pendiri Pesantren Demangan Bangkalan), KH Hasyim Asy'ari (pendiri Pesantren Tebu Ireng Jombang), dan KH Abdul Karim (pendiri Pesantren Lirboyo

Kediri), menggambarkan betapa kiai mempunyai pengaruh dan peranan yang besar dalam kehidupan sosialkeagamaan masyarakat.

Sebagai pewaris kenabian, ulama, termasuk kiai, mempunyai tugas utama, yaitu melanjutkan dan mewarisi ilmu dan perjuangan Nabi. Nabi Muhammad sebagai pemuka atau pemimpin umat memiliki peran ganda dalam masyarakat Madinah, yaitu sebagai pemimpin agama yang memiliki otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa agama serta sebagai pemimpin politik yang berwenang mengatur urusan kenegaraan (politik) dan kemasyarakatan. Begitu juga ulama

sebagai pewaris Nabi juga mempunyai peran ganda di atas yang diimplementasikan melalui kelebihan-kelebihan yang melekat dalam dirinya. Tulisan ini berupaya menelaah berbagai perilaku kiai dalam ranah politik di Kabupaten Pamekasan, sebagai wilayah yang di dalamnya tumbuh subur kekuatan religio-politik dengan tingginya pengaruh kiai dalam kehidupan politik umat.

### **Perilaku Politik Kiai di Pamekasan**

Masyarakat Pamekasan merupakan masyarakat tradisional religius. Religiusitas mereka tampak dari simbol-simbol dan atribut keagamaan yang tercermin dari kehidupan mereka sehari-hari. Gambaran itu, misalnya, terlihat dari pola tatanan rumah-rumah di Pamekasan, yakni berpola *taneyan lanjång* (halaman panjang). Dengan pola tersebut, terdapat sekelompok bangunan rumah (tujuh sampai delapan rumah), yang dilengkapi dengan sebuah langgar tempat beribadah kepada Allah. Di samping itu, masyarakat Pamekasan, terutama di pedesaan, menempatkan kiai sebagai pemimpin sentral yang seringkali melebihi kedudukan dan wewenang pemimpin masyarakat lainnya, seperti pejabat pemerintah. Kiai lebih disegani dan dipatuhi ketimbang seorang kepala desa atau aparat keamanan. Mereka lebih condong untuk memilih kiai dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hidupnya daripada mengadukannya kepada pejabat pemerintah. Indikasi tentang tingginya posisi kiai di masyarakat, misalnya, fenomena yang terjadi di beberapa kawasan di Pamekasan, yang di dalamnya terdapat persaingan antara lembaga pendidikan pemerintah dan lembaga pendidikan pesantren/madrasah di bawah asuhan

seorang kiai. Lembaga pendidikan pemerintah di daerah-daerah ini umumnya sepi peminat dan bahkan harus ditutup karena ketiadaan anak didik. Hal ini disebabkan anak-anak usia sekolah semuanya telah tersedot oleh lembaga pendidikan Islam (pesantren dan madrasah).

Dengan peran dan posisi yang sedemikian tinggi, kiai di Pamekasan digambarkan sebagai manifestasi makrokosmos yang memiliki kelebihan-kelebihan berupa ketinggian ilmu dan keagungan pribadi, yang dengannya ia mendapatkan *previlage* berupa perlakuan dan hak-hak istimewa dari masyarakat. Hal ini yang menyebabkan banyak kalangan kiai yang bergaya hidup mewah dengan berpenampilan sebagai orang kaya desa. Penampilan dan gaya hidup yang mewah kiai di atas merupakan imbas dari *image* yang berlaku dalam masyarakat Pamekasan, yang secara umum beranggapan bahwa nilai kesuksesan seorang diukur dengan seberapa banyak materi atau kekayaan yang dimikinya. Tolak ukur yang bersifat materialistis ini juga mereka tujukan kepada para kiai. Hal ini terlihat dari rasa hormat dan penghargaan yang tinggi ditujukan kepada para kiai yang berpenampilan lebih mewah dari pada yang lainnya. Akibatnya para kiai berusaha memiliki atribut-atribut kemewahan, seperti mobil, HP, dan lain-lain.

Di lain pihak, kiai di Pamekasan berusaha mempertahankan *previlage* yang dimilikinya dengan beberapa cara, yaitu: *Pertama*, melakukan perkawinan *indegenous*, yakni perkawinan antar keluarga dekat yang dalam hal ini adalah perkawinan antar keluarga kiai. Dengan cara ini, kiai menghendaki semua

anggota keluarganya (menantu anak dan cucunya) adalah orang yang berstatus kiai atau setidaknya berketurunan kiai. Sangat jarang terjadi di Pamekasan, kiai yang menikahkan anaknya dengan anak dari kalangan orang awam. Jika terjadi perkawinan antar mereka, hal itu disebabkan calon menantu kiai tersebut berasal dari kalangan orang kaya raya atau santrinya yang paling alim. Dengan pola perkawinan semacam itu, maka kiai dapat mempertahankan status dan *previlage* yang ia miliki.

*Kedua*, dengan menciptakan *image* bahwa anak dan keturunan kiai merupakan seorang yang dapat mewarisi ilmu, dan atribut-atribut spiritual yang dimiliki ayahnya. Upaya ini dilakukan dengan jalan memberlakukan konvensi kepada santri dan masyarakat untuk menghormati para anak kiai dan anggota keluarga lainnya. Penciptaan *image* ini juga diakui oleh Zamakhsyari Dhofier, yang menyatakan bahwa *gus* digambarkan sebagai seorang yang dapat mewariskan kelebihan-kelebihan yang melekat pada diri kiai, baik ilmu maupun kekuatan supranatural.<sup>1</sup> Namun demikian, penciptaan *image* di atas juga diimbangi dengan mempersiapkan anak-anak kiai dengan pengajaran dan pendidikan yang ditanganinya secara langsung atau mengirimkan mereka ke pondok-pondok pesantren di bawah asuhan kiai-kiai terkenal. Upaya ini dilakukan agar pada masa berikutnya anak-anak kiai ini dapat menjadi kiai yang mumpuni dan melanjutkan kepemimpinan ayahnya.

*Ketiga*, membuat aturan tidak tertulis bahwa yang berhak menggantikan kedudukannya adalah

anak laki-laki atau menantu laki-laki. Meskipun ketentuan ini tidak dapat disalahkan, karena secara faktual pesantren didirikan dan dibesarkan oleh kiai meskipun secara legal formal pesantren merupakan milik masyarakat, namun hal itu telah menjadikan pesantren sebagai suatu kerajaan kecil yang suksesi kepemimpinannya didasarkan atas keturunan. Dengan demikian, *lora-lora* merupakan putera mahkota yang nantinya akan menggantikan kedudukan ayahnya.

Di masyarakat Pamekasan, seorang yang akan tampil menjadi kiai harus memiliki legitimasi keturunan. Dengan kata lain faktor keturunan menentukan sekali dalam mengantarkan seseorang menjadi pemuka agama/ kiai. Demikian juga seorang akan diterima dan diakui sebagai kiai oleh kiai lainnya jika ia mempunyai garis keturunan kiai. Implikasinya seorang dari keturunan masyarakat awam sulit untuk tampil sebagai kiai atau mendirikan pondok pesantren.

Dalam dunia pesantren, kharisma yang diperoleh dari generasi terdahulu (ayah atau kakek) merupakan modal dasar dan utama – di samping kharisma diri sendiri yang bersumber dari ketinggian ilmu dan keagungan pribadi-- bagi seseorang yang akan menjadi pemimpin agama. Sisi lain akan pentingnya garis keturunan ini adalah bahwa di kalangan kiai Pamekasan dalam memilih calon menantunya adalah lebih diutamakan seorang yang memiliki keturunan kiai meskipun di luar itu terdapat seorang yang lebih alim namun bukan keturunan kiai. Pemikiran ini didasarkan bahwa keturunan kiai merupakan sosok pribadi yang memperoleh kemampuan untuk memimpin masyarakat. Jadi, Masyarakat

---

<sup>1</sup>Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES, 1982) hlm. 32

Pamekasan mengenal adanya "titisan dari langit" dalam melegitimasi seorang yang akan tampil menjadi pemimpin agama.

Sebagai pemimpin non formal, kiai di Pamekasan memiliki jaringan intelektual yang bermula dari transmisi kelimuan yang ditularkan oleh kiai kepada santrinya, yang pada masa berikutnya tampil sebagai kiai. Transmisi kelimuan ini membuahakan suatu ketergantungan, baik secara emosional maupun intelektual, yang mendalam antara seorang kiai dengan santrinya tersebut. Ketergantungan ini terus berlakelanjutan sampai si santri menyelesaikan pendidikannya –bahkan hingga selama-lamannya-, yang dapat menjadi pendorong terciptanya ikatan antara kiai dan santri.

Selain ikatan antara kiai dengan mantan santrinya itu, juga terjadi ikatan antar kiai yang menempuh pendidikan di lembaga pendidikan (pesantren) yang sama, yang disebabkan oleh kesamaan guru dan kesamaan emosional karena berasal dari almamater yang sama. Kemunculan kelompok-kelompok keagamaan sama-sama mendapatkan tanggapan yang luas di masyarakat, karena keduanya dipelopori ulama, yang terkenal kealimannya dan mempunyai pengaruh yang sangat luas.

### **Pola Penggalangan Dukungan Politik Keagamaan di Pamekasan**

Terdapat beberapa cara yang digunakan kiai dalam upaya menjadikan kelompoknya berkembang dan mendapat dukungan luas di masyarakat, yaitu: *Pertama*, menjadikan santri sebagai *agent* dalam menyebarkan keberadaan kelompok tersebut dengan kiai tertentu sebagai figur sentralnya. Upaya ini sangat efektif dilakukan mengingat para santri

adalah pemuka-pemuka agama di masyarakat pada tingkat terbawah – tingkat kampung dan desa-, sehingga pesan-pesan dapat disampaikan dengan bahasa yang lugas dan dapat diterima oleh masyarakat awam. Di lain pihak di kalangan santri terdapat keyakinan yang kental bahwa seorang santri tidak boleh bersebarangan dengan kiaiinya dalam semua aspek kehidupannya meskipun kiaiinya tidak memerintahkan untuk mengikuti semua langkahnya.

*Kedua*, mengusahakan dukungan dari para kerabat kiai yang umumnya juga merupakan tokoh ulama dan memiliki pengaruh yang luas di masyarakat. Para kerabat kiai yang mendukung itu umumnya memiliki visi dan pandangan yang sama atau pernah berguru di pesantren yang sama.

*Ketiga*, dukungan dari kelompok kiai lain yang tidak termasuk kelompok lawan dan memiliki visi dan pandangan yang sama – yang bersumber dari kesamaan almamater dan lain-lain-.Kiai-kiai inilah yang juga mempunyai andil besar dalam membesarkan kelompok tersebut mengingat mereka juga mempunyai pengaruh yang luas di masyarakat.

Sedangkan latar belakang kiai Pamekasan terlibat dalam kehidupan politik lebih bersifat historis-geneologis dan kultural. Mereka umumnya melibatkan diri ke dalam dunia politik karena berkiblat kepada para pendahulu mereka dalam visi dan pandangan politiknya. Di samping itu, para kiai yang terlibat dalam dunia politik merasa berkewajiban untuk meneruskan langkah dan sepak terjang para pendahulunya, yang mereka yakini sebagai suatu bentuk pengabdian mereka kepada para pendahulu mereka (ayah dan kakek).

Berangkat dari hal di atas, maka tidak mengherankan jika suatu kelompok keagamaan di Pamekasan dirintis dan dipimpin oleh para kiai yang masih mempunyai keturunan yang sama. Dengan kata lain, para elit organisasi keagamaan di Pamekasan terdiri dari orang-orang yang masih memiliki hubungan kekeluargaan dan kekerabatan.

Keterlibatan kiai dalam bidang politik diperkuat dengan data historis yang menggambarkan bahwa pada umumnya kiai-kiai telah berkicimpung dalam politik, sejak masih bercokolnya penjajahan di Pamekasan. Peran ini dilanjutkan pada masa orde lama-dengan keterlibatan mereka dalam melawan PKI di Pamekasan. Selanjutnya pada masa Orde Baru mereka terlibat dalam politik dengan menjadikan Partai Persatuan Pembangunan sebagai satu-satunya wadah aspirasi dan perjuangan politik mereka.

### **Pola Kepemimpinan Religio-Politik di Pamekasan**

Secara kultural keterlibatan kiai-kiai di Pamekasan dalam bidang politik juga disebabkan tatanan budaya masyarakat Pamekasan, yang menempatkan kiai sebagai sosok pemimpin masyarakat dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya. Kiai merupakan figur yang harus dihormati dan ditaati bahkan sering dikultuskan. Fakta ini mengakibatkan kepemimpinan kiai tidak terbatas pada lingkup wilayah keagamaan, namun juga merambah hingga keseluruhan kehidupan termasuk dalam bidang politik.

Keterlibatan kiai dalam bidang politik ditandai dengan partisipasi mereka dalam bidang politik. Michael Rush dan Philip Althof menyebutkan bahwa

partisipasi dalam bidang politik terdiri dari bentuk pasif dan aktif yang tersusun mulai dari menduduki jabatan dalam organisasi politik hingga kepada memberi dukungan finansial dengan jalan membayar iuran keanggotaan.<sup>2</sup>

Dalam menjalankan kepemimpinan politiknya, kiai menggunakan wewenangnya berdasarkan kharisma (*charismatic authority*) yang dimilikinya, yang menurut Max Weber adalah suatu kemampuan khusus yang ada pada diri seseorang dan merupakan anugerah dari Tuhan.<sup>3</sup> Dengan wewenang kharismatik ini, kiai diakui sebagai sosok yang memiliki kemampuan memimpin yang berada di atas kemampuan ummat yang dipimpinnya. Kharisma ini terwujud dari kepercayaan dan pemujaan terhadap kiai. Dasar dari wewenang kharismatik ini bukanlah terletak pada suatu aturan (hukum). Namun bersumber dari pribadi kiai yang bersangkutan. Kharisma ini semakin meningkat sejalan dengan kemampuan kiai untuk membuktikan manfaatnya bagi masyarakat. Wewenang kharismatis ini dapat berkurang atau hilang sama sekali jika ternyata individu yang bersangkutan melakukan kesalahan-kesalahan yang merugikan masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat terhadapnya semakin berkurang.

Di samping wewenang kharismatik yang dimilikinya, kiai memiliki wewenang tradisional (*traditional authority*). Weber menyebutkan wewenang ini sebagai wewenang yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang yang telah lama

---

<sup>2</sup>Michael Rush & Philip Althof, *Pengantar Sosiologi Politik*, terj. Kartini Kartono (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm. 128.

<sup>3</sup>Turner, *Sebuah*, hlm. 36

memegang kekuasaan dalam suatu masyarakat. Wewenang ini bukanlah disebabkan karena kelebihan-kelebihan dan kekhususan yang dimiliki seseorang, namun karena ia telah lama memegang kekuasaan sehingga masyarakat sangat memercayainya dan mendarah daging dalam kehidupannya.<sup>4</sup>

Wewenang tradisional ini terlihat ketika seorang kiai muda yang menduduki jabatan strategis dalam kepengurusan partai politik yang berbasiskan umat Islam pada awal keterlibatannya dalam politik praktis tanpa melalui proses pengkaderan yang sewajarnya. Munculnya kiai sebagai *top leader* dengan cara di atas diterima begitu saja oleh masyarakat karena hal itu dianggap sebagai suatu kelaziman. Fenomena di atas di antaranya terlihat dari peran dan wewenang para kiai yang duduk dalam Majelis Pertimbangan Partai (MPP) Partai Persatuan Pembangunan, yang secara *de facto* memegang peran dan wewenang yang besar dalam menentukan arah dan visi partai serta dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis partai, seperti penentuan ketua partai, Ketua DPRD, dan lain-lain. Pengurus partai dalam hal ini hanya menjalankan kebijakan-kebijakan strategis yang telah diputuskan oleh para kiai anggota MPP. Hal ini terwujud karena adanya penghormatan dan kharisma yang tinggi pada sosok kiai serta adanya tradisi dalam masyarakat dan pelaku politik di Pamekasan, bahwa kiai adalah sosok yang mempunyai kemampuan dan akseptabilitas dalam memimpin. Peran dan kewenangan pengurus partai lebih ditujukan kepada hal-hal yang bersifat

teknis operasional guna melancarkan dan menyukseskan keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh MPP.

Hal di atas paling tidak akan memberikan akibat yang dalam satu sisi kiai dapat "digunakan" sebagai *agent* dalam penyampaian pesan-pesan politik, namun pada sisi lain akan menimbulkan perseteruan kelompok-kelompok keagamaan sebagai eksekusi dari perbedaan visi politik kiai. Keadaan semacam ini setidaknya terjadi pada kiai-kiai di Pamekasan, yang dalam kehidupan politiknya diwarnai perbedaan mencolok bahkan sering menjurus kepada persaingan dan pertikaian, yang menurut George Simmel<sup>5</sup> persaingan merupakan dibedakan menjadi dua yaitu, persaingan yang dilakukan untuk mematahkan dan menghambat kemajuan lawan dan persaingan yang dijalankan sebagai upaya mencapai tujuan kelompok tanpa menyingkirkan lawan.

Berdasarkan kedua tipe persaingan di atas, fenomena keterlibatan kiai-kiai di Pamekasan dalam percaturan politik, terlihat adanya perpaduan antara keduanya mengingat di samping mereka bersaing untuk mendapatkan dukungan yang terbesar dari masyarakat, mereka juga terlibat dalam persaingan yang tidak sehat, yakni dengan berupaya saling memojokkan dan menjatuhkan lawan masing-masing. Di samping persaingan kiai antar kelompok keagamaan, di Pamekasan juga terjadi persaingan interes kelompok yang menjurus pada perebutan posisi kedudukan strategis seperti jabatan ketua dan sekeretaris. Persaingan kiai dalam bidang politik ini seringkali membawa implikasi terjadinya pertentangan pada tingkat bawah

---

<sup>4</sup>Sarjono Soekanto, *Sosiologi; Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 311

---

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto, *Beberapa Teori Sosiologis George Simmel*, (Jakarta: CV Rajawali, 1986), hlm. 40

masyarakat (*grass root*) yang dengannya masyarakat terpecah dalam berberapa kelompok yang mengatasnamakan agama.

Untuk mempertahankan hegemoni kiai terhadap masyarakat dalam kehidupan politik, kiai berusaha untuk tetap mendapat dukungan masyarakat dengan tetap mempertahankan pola-pola kepemimpinan yang lama ia terapkan dalam dunia pesantren. Dengan kata lain, pola-pola kepemimpinan kiai di pesantren terbawa dan mewarnai dalam kepemimpinan mereka dalam bidang politik.

Di lain pihak, kiai menginginkan agar kepentingannya diperjuangkan di samping keinginan mereka untuk dapat mengontrol kekuasaan-kekuasaan politis. Untuk menjamin terlaksananya kedua keinginan di atas, kiai menggunakan sistem *patronage*, yaitu dengan meletakkan orang-orang kepercayaannya pada posisi-posisi strategis dalam birokrasi dan lembaga legislatif. Dengan cara ini maka kiai disamping dapat mengontrol perilaku para politisi juga dapat melangsungkan hubungan mutualistik antara dirinya sebagai *patron* dan orang-orang kepercayaannya sebagai *client*. Hubungan *patronage* inilah yang menurut Michael Rush disebut sebagai metode yang cukup mapan untuk mempengaruhi pelaksanaan kekuasaan politik melalui berbagai tingkat pengawasan.<sup>6</sup> Sistem ini juga dapat digunakan sebagai sarana bagi perekrutan politik dalam mengisi jabatan-jabatan politik.

Dengan demikian, dalam kehidupan politik ummat Islam di Pamekasan telah terjadi hubungan

“atasan dan bawahan”, di mana kiai berperan sebagai atasan dan politisi kepercayaannya sebagai bawahan. Antara keduanya terjalin suatu ikatan non formal dalam mendapatkan keuntungan dan tujuan politik masing-masing, misalnya keinginan untuk mendapat posisi tertentu, fasilitas, dan lain-lain. Hubungan *patronage* terlihat dari proses pencalonan anggota legislatif di DPRD Pamekasan, yang pengajuan nama-nama calon dari PPP dan PKB Pamekasan lebih merupakan representasi kepentingan para kiai.

Dalam kaitan dengan penggalangan massa, para kiai menggunakan beberapa metode yang bervariasi, yaitu: *Pertama*, pendekatan secara persuasif. Cara ini digunakan oleh sebagian kiai dengan cara menyebarkan logo, stiker dan tanda gambar yang berisi dukungan terhadap partai politik tertentu, di samping juga dibarengi dengan penyampaian pesan-pesan politik dan dukungan terhadap partai tersebut. Dalam tradisi masyarakat santri di Pamekasan, pemberian kiai, berupa apa pun, merupakan suatu yang mengandung “barakah”, yang menurut Abdurrahman Wahid merupakan kerelaan kiai kepada santrinya.<sup>7</sup> Konsep “barakah” inilah yang melahirkan sikap penyerahan dan ketundukan santri. Oleh karenanya santri tidak berani akan menyia-nyiakan “barakah” tersebut, karena hal itu merupakan suatu pelanggaran berat.<sup>8</sup>

*Kedua*, dengan cara menggunakan mediator dalam menyampaikan pesan-

---

<sup>7</sup>Abdurrahman Wahid, “Pesantren Sebagai Sub Kultur”, ed. M. Dawam Raharjo, *Pesantren dan Perubahan*, (Jakarta:LP3ES, 1995), hlm. 49

<sup>8</sup>Terdapat suatu keyakinan dalam pesantren bahwa seorang yang tidak mendapatkan barakah ia tidak dapat menjadi manusia berguna, meskipun ia memiliki ketinggian ilmu.

---

<sup>6</sup>Rush & Althof, *Pengantar*, hlm. 128.

pesan politik kepada seluruh lapisan masyarakat. Mediator dalam hal ini adalah para *ustadz* dan guru ngaji yang pernah berguru kepada seorang kiai. Mereka adalah para alumni pesantren yang telah menunjukkan loyalitasnya, mulai mereka menjadi santri hingga keluar dan terjun ke masyarakat luas. Dengan sarana fisik, berupa musalla, langgar, dan madrasah, dan non fisik, berupa pengajian-pengajian baik rutin maupun insidental, mereka terbukti secara efektif dapat melakukan upaya penggalangan dukungan masyarakat terhadap partai politik tertentu. Hal ini setidaknya terlihat dalam pengerahan massa yang dilakukan oleh mereka sewaktu diselenggarakannya acara-acara Nahdlatul Ulama, semisal *istighatsah*, mereka berhasil mengerahkan massa dalam jumlah besar dan terkendali di bawah pengawasan mereka.

Selain itu, para kiai menggunakan kelompok masyarakat lainnya untuk menggalang dukungan masyarakat yaitu para saudagar dan preman. Para saudagar berperan sebagai penyandang dana aktifitas partai dan preman berfungsi sebagai "petugas keamanan" yang menjamin keberlangsungan dan kesuksesan kegiatan-kegiatan partai.

Penggalangan massa dengan menggunakan simbol-simbol agama akan memberikan suatu paradoks terhadap fungsi profetik agama dalam kehidupan manusia. Kepentingan politik cenderung bersifat jangka pendek yang tujuannya terletak pada diraihnya kekuasaan tertentu terutama penempatan posisi-posisi penting. Pada saat yang sama mobilisasi politik di kalangan ummat beragama menimbulkan semangat massa yang disertai dengan munculnya rasa kebanggaan kelompok,

tumbuh suburnya harapan untuk mendapatkan kekuasaan, rasa eksklusifisme yang tinggi, dan simbolisasi agama.<sup>9</sup>

Penggalangan massa yang didukung dengan kuatnya kepemimpinan kharismatis kiai yang mengakibatkan fanatisme yang kuat pada sosok kiai/ sekelompok kiai- melahirkan suatu solidaritas dan ikatan sosial yang kuat dalam suatu kelompok keagamaan. Ikatan ini tercipta melalui kristalisasi para kiai dalam suatu kelompok- dengan atribut, simbol dan sosok kiai sentral dengan massa pendukungnya.

Semangat religio politik di atas akan menggeser fungsi-fungsi substantif dan profetik agama yaitu dari kasih sayang, kemanusiaan, inklusif, persaudaraan dan keselamatan untuk semua kepada kebencian, kekejaman, eksklusif, dan perpecahan.<sup>10</sup> Dengan sistem kepemimpinan kharismatis dan penggalangan massa dengan menggunakan simbol agama akan menimbulkan suatu ikatan kelompok yang selanjutnya memunculkan solidaritas kelompok antarummat beragama.

Solidaritas antar mereka muncul karena persamaan paham, visi dan teritorial. Solidaritas yang demikian inilah yang disebut Emile Durheim sebagai "solidaritas melalui persamaan".<sup>11</sup> Solidaritas ini merupakan lawan dari "solidaritas melalui pembagian kerja", yang merupakan dasar bagi kelompok-kelompok korporat. Di kalangan ummat Islam Pamekasan terjadi solidaritas karena berbagai persamaan,

<sup>9</sup>Haedar Nashir, "Agama dan Mobilisasi Politik Massa", dalam *Atas Nama Agama: Wacana Agama Dalam Dialog Bebas Konflik*, ed. Andito (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), hlm. 175.

<sup>10</sup>Ibid.

<sup>11</sup>Maurice Duveger, *Sosiologi Politik*, terj. Daniel Dhakida (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm. 248.



seperti persamaan guru, almamater, teritorial.

### **Penutup**

Keterlibatan kiai Pamekasan dalam politik mengambil bentuk yang bervariasi, yaitu keterlibatan secara passif, keterlibatan secara aktif di luar struktur kepengurusan partai politik dan keterlibatan secara aktif dalam jabatan dan kepengurusan partai politik

Sebagai pemimpin agama di masyarakat kiai tidak dapat melepaskan diri dari kehidupan politik, yang dengannya melahirkan kepemimpinan politik kiai, yang menganut pola sentralistik-kharismatik sebagaimana ia terapkan di pesantren asuhannya. Dalam partai politik yang berbasis ummat Islam di Pamekasan, kiai memegang peran dominan serta kedudukan

strategis, yang keputusan dan kebijakannya merupakan keputusan tertinggi yang harus dijalankan oleh pengurus partai. Hal ini karena pada hakikatnya kiai lah yang memiliki massa pendukung dan oleh karenanya kiai dapat menentukan visi dan kebijakan partai. Dalam memobilisasi atau menggalang dukungan yang luas dari masyarakat kiai menggunakan beberapa metode, yaitu metode persuasif dan aktif mempropagandakan partai politik tertentu melalui mediator yang biasanya diambil dari santri dan pengikut fanatiknya. Di samping itu, kiai menggunakan jasa kelompok masyarakat lainnya seperti para pedagang dan preman untuk menyampaikan pesan-pesan politik kepada masyarakat hingga pada lapisan terbawah. *Wa Allāh a'lam bi al-sawāb* □

